

**Kiswah Ka'Bah Diangkat,
Musim Haji 2025 Dimulai**

Kain Putih Lilit Ka'bah, Musim Haji 2025 Dimulai Pekerjaan menggulung atau mengangkat kiswah [kain hitam penutup Ka'bah] dan melapisinya dengan kain putih yang dililitkan. Kegiatan ini dilaksanakan selepas Isya pada Selasa (13/5/2025) malam WAS atau Rabu (14/5/2025) dini hari WIB. Tradisi tersebut simbol dimulainya musim haji 2025. Dengan penggulungan/pengangkatan kiswah ini, maka jamaah yang semula menyentuh Ka'bah dengan lewat kiswah yang terbuat dari kain sutra nan halus, kini bisa langsung memegang struktur batu Ka'bah. Kiswah yang diangkat akan diturunkan seperti sedia kala setelah musim haji 2025 selesai. Nantinya, kiswah akan diganti dengan yang baru pada 1 Muharam 1447 H (sekitar 27 Juni 2025), bertepatan dengan tahun baru Islam. (AlharamainSA)

Peliknya Polemik Ijazah Jokowi Megawati Kini Ikut Bersuara

Polemik soal keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) makin pelik dan berlarut-larut. Bahkan, aksi ayah Wapres Gibran ini yaitu dengan menemui dosen pembimbing akademik semasa kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM), Ir Kasmudjo, tak juga meredakan kegaduhan. Bahkan terbaru, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri mulai ikut bersuara soal polemik tuduhan ijazah palsu. Ketum PDIP itu menyarankan untuk menunjukkan ijazahnya agar tak menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Di sisi lain daftar laporan ke polisi terkait kasus ini makin panjang. Kabar terbaru, mediasi gugatan perdata terkait keabsahan ijazah Jokowi kembali buntu. Muhammad Taufiq selaku pihak penggugat dan Jokowi sebagai tergugat gagal mencapai kata sepakat di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta, Rabu (14/5/2025). Sebelumnya, pihak Jokowi sendiri juga melaporkan lima orang yaitu, Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tyassuma, sosok berinisial ES, dan K. Pelaporan tersebut terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Di sisi lain, sekelompok advokat yang tergabung dalam Peradi Bersatu mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan 4 orang yaitu mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Rizal Fadillah dan dokter Tifauzia Tyassuma. Keempatnya dilaporkan sebagai pembuat kegaduhan soal ijazah palsu Jokowi. Tak hanya itu, di PN Sleman juga mendaftarkan gugatan terkait ijazah Jokowi. Dalam perkara ini pihak penggugat yakni Ir Komardin. Sementara para pihak tergugat dalam perkara ini para petinggi dan dosen UGM dengan nilai gugatan Rp 69 triliun. Sementara, Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dian Sandi Utama juga dilaporkan ke Bareskrim Polri karena memposting foto ijazah kuliah UGM Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di akun media sosial X miliknya. Duh.

Baca Hal 11...

Deretan Laporan dan Gugatan soal Ijazah Jokowi

- **Gugatan di PN Solo:**
Pengacara Muhammad Taufiq menggugat Jokowi, KPU Solo, SMAN 6, dan UGM terkait dugaan ijazah palsu (Perkara No. 99/Pdt.G/2025/PN Skt). Mediasi ketiga pada 14 Mei 2025 kembali gagal.
- **Laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya:**
Jokowi melaporkan lima orang, termasuk Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma, atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah (30 April 2025) menggunakan UU ITE.
- **Peradi Bersatu Laporkan Roy Suryo Cs:**
Roy Suryo dan empat lainnya dilaporkan Peradi Bersatu atas dugaan penyebaran hoaks dan provokasi terkait ijazah Jokowi. Laporan masuk dengan nomor LP/B/1387/V/2025.
- **UGM Digugat Rp1.069 Triliun:**
UGM dan sejumlah pejabatnya digugat di PN Sleman (Perkara No. 106/Pdt.G/2025) atas dugaan perbuatan melawan hukum. Tuntutan: Rp69 triliun materiil dan Rp1.000 triliun immateriil.
- **Kader PSI Dilaporkan:**
Dian Sandi Utama, kader PSI, dilaporkan ke Bareskrim karena unggah foto ijazah Jokowi tanpa izin. Pelapor: Dosen USU berinisial YLH. Dugaan pelanggaran: Pasal 32 UU ITE.

SUMBER :
Berbagai sumber
diolah



Peresmian dapur SPPG oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, (PDT), Yandri Susanto, bersama Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid di di Desa Panongan, Tangerang, Banten, Rabu (14/5/2025). (Dok.Pemkab Tangerang)

Ombudsman: Calo Bergentayangan di Program MBG

Setelah mendapatkan penjelasan dari BGN, tutur Yeka, rupanya hal itu terjadi karena kurangnya persiapan pemerintah dalam melaksanakan program. Perencanaan anggaran program yang seharusnya siap di Desember 2024 ternyata tidak tuntas.

Namun, program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu tetap harus berjalan pada Januari 2025 lantaran tensi politik yang tinggi. "Oleh karena itu jalan yang harus dilakukan BGN adalah program ini harus running dengan berbagai keterbatasan yang ada," kata Yeka.

Dia menyebut ketidaksiapan pemerintah dalam mengelola anggaran MBG menyebabkan munculnya 'calo-calo' atau pihak ketiga yang memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadi. "Jadi harusnya antara yayasan dan pemilik dapur, ternyata saya melihat ada bergentayangan calo-calo yayasan,"

kata dia.

Ke depan, Ombudsman mengusulkan agar pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mempermudah pemberian izin yayasan guna memperkecil celah munculnya pihak ketiga. "Khususnya bagi masyarakat yang sudah memiliki kesiapan berkontribusi dalam membangun dapurnya."

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pihaknya sudah melakukan sejumlah pembenahan mengenai mekanisme pembayaran. Kini, pembayaran kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilakukan di muka melalui online. (dun, ant, ist, tmo/dya)

Karut marut program Makan Bergizi Gratis (MBG) makin banyak yang terungkap, setelah terjadi keracunan massal di berbagai daerah. Temuan lain yang mengejutkan adalah Ombudsman RI menyebut ada calo-calo yayasan yang menguasai dapur MBG.

Hal ini diungkap oleh Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika setelah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Kantor Ombudsman RI, Rabu (14/5/2025).

"Intinya di lapangan itu satu pemilik, antara yayasan dengan pemilik dapur gitu. Asumsi itu, ternyata ini bahasa saya bukan bahasanya Pak Dadan, saya melihat bahwa bergentayangan calo-calo yayasan," kata Yeka dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman.

Meski begitu, dalam kesepakatannya bersama BGN, ke depan BGN telah meminta kepada Kementerian Hukum untuk mempermudah proses yayasan agar dapat berjalan untuk memenuhi program ini dan tidak ada timbul kecurangan akibat calo-calo tersebut.

"Tadi sudah disepakati dan sudah dijalankan bahwa untuk kedepan ini BGN sudah meminta Kementerian Hukum untuk mempermudah proses yayasan terutama bagi masyarakat yang sudah memiliki kesiapan berkontribusi dalam membentuk atau membangun dapurnya," ujarnya.

Diketahui tahun ini, pemerintah menargetkan 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbentuk, di mana sekitar 2.000 SPPG dibangun dengan menggunakan APBN, sedangkan sisanya yakni 28.000 SPPG yang dibangun oleh mitra.

Ombudsman juga menemukan pembayaran yang tertunda. Namun hal ini sudah terselesaikan karena per

bulan ini, anggaran untuk pelaksanaan program ini akan dilakukan dengan pembayaran di muka.

"Jadi biaya untuk 10 hari ke depan itu sudah ditransfer dari awal, dan nanti 5 hari berikutnya SPPG mengajukan anggaran untuk 10 hari berikutnya lagi," pungkasnya.

Salah satu temuan penting lain dari asesmen yang dilakukan adalah tidak adanya transparansi mengenai pembiayaan.

"Selama Januari-April ini kami catat banyak persoalan di lapangan, karena Ombudsman melihat program ini tidak didukung oleh kebijakan anggaran yang memadai," tutur Anggota Ombudsman Yeka.

BPOM Akan Ikut Awasi SPPG dan Bahan Baku

BADAN Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan mengawasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta penggunaan bahan baku usai adanya temuan keracunan makan bergizi gratis (MBG) di Bogor.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menuturkan, Badan Gizi Nasional (BGN) juga melibatkan BPOM untuk implementasi MBG.

"Kami belajar bagaimana dapurnya nanti diperbaiki. Dari bahan baku juga pasti, BGN melibatkan Badan POM dan kami akan terlibat secara utuh," ujar Taruna saat ditemui di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025).

Taruna mengatakan, kasus keracunan MBG di Bogor akan terus dipantau dan korban keracunan juga bakal ditangani secara serius. "Kasus itu akan tetap kami back-up, kalau terjadi itu kami akan belajar dari kejadian itu, dan kami cegah. Kami cegah, yang (terkena bakteri) salmonella, kami obati," ujar dia.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, keracunan

MBG di Bogor disebabkan kontaminasi dua jenis bakteri, *Escherichia coli* (E.coli) dan *Salmonella*. Dadan mengatakan, dua bakteri itu ditemukan pada bahan baku makanan, terdapat di telur dan sayuran yang dikonsumsi anak-anak.

"Kami sudah cek bahwa penyebabnya ini sudah keluar dari lab, bahwa ada kontaminasi *Salmonella* dan *E.coli* ya dari bakteri," kata Dadan di Gedung Ombudsman, Jakarta.

"Itu ada di air, ada di bahan baku, di telur, dan juga ada di sayuran," tambah Dadan.

Data terbaru, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor mencatat total korban mencapai 223 orang hingga Selasa (13/5/2025). Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menyampaikan bahwa data ini merupakan hasil dari penyelidikan epidemiologi terbaru.

BGN resmi menonaktifkan operasional dapur penyedia makan bergizi gratis (MBG) milik Sekolah Bosowa Bina Insani di Kota Bogor. Langkah ini diambil menyusul kasus

Deretan Peristiwa Keracunan Diduga karena MBG

- **Bogor, Jawa Barat (11 Mei 2025):** 223 siswa TK-SMP keracunan usai makan MBG.
- **PALI, Sumsel (5 Mei 2025):** 174 siswa keracunan setelah konsumsi MBG siang hari.
- **Cianjur, Jawa Barat (21 April 2025):** 78 siswa MAN dan SMP alami gejala keracunan usai makan MBG.
- **Sukoharjo, Jateng (16 Januari 2025):** 40 siswa SD alami mual dan muntah, ayam goreng MBG diduga kurang matang.
- **Semarang, Jateng (4 Februari 2025):** Siswa SMA keracunan usai makan mendoan basi dari MBG.
- **Empat Lawang, Sumsel (18 Februari 2025):** 8 siswa SD muntah dan sakit perut, diduga makan MBG basi dan berulat.
- **Sumba Timur, NTT (18 Februari 2025):** 15 siswa SD keracunan setelah makan MBG berisi nasi, mi goreng, tahu, tempe, telur, dan pisang.
- **Pandeglang, Banten (19 Februari 2025):** 28 siswa SDN Alaswangi 2 diduga keracunan MBG, dilaporkan oleh orang tua siswa.

dugaan keracunan massal yang menimpa sedikitnya 223 siswa dan guru dari 13 sekolah yang menerima layanan MBG dari dapur tersebut.

Sebanyak 27 siswa sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, sementara 18 lainnya masih dirawat di beberapa fasilitas kesehatan seperti RS Hermina, RS Islam, RSUD Kota Bogor, RS PMI, dan lainnya. (wid, ant, rls/dya)

Terang Benderang Politik Uang di PSU Barito Utara MK Putuskan Semua Pasangan Calon Gugur

Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi semua pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Barito Utara. Mereka terbukti 'terang benderang' melakukan politik uang dengan nominal fantastis mencapai Rp 64 juta/ keluarga. Ada juga yang sebesar Rp 6,5 juta-Rp 16 juta/orang plus janji umrah gratis

Diskualifikasi itu dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo dalam sidang gugatan hasil Pilkada Barito Utara 2024 pada Rabu (14/5/2025).

"Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (H. Gogo Purman Jaya, S.Sos., dan Drs. Hendro Nakalelo, M.Si.) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A., dan Sastra Jaya) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024," kata Suhartoyo, Rabu (14/5/2025).

Dalam pertimbangannya, hakim MK Guntur Hamzah mengatakan, kedua paslon terbukti terlibat politik uang yang sangat masif sehingga merusak demokrasi di Indonesia.

Fakta politik uang yang cukup besar ini dinilai sama sekali tidak dapat ditoleransi. Oleh karena itu, MK menilai tepat dan adil jika kedua pasangan calon dinyatakan telah melakukan praktik money politics yang mencederai prinsip-prinsip pemilihan umum dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Guntur mengatakan, secara lebih sederhana, praktik politik uang itu benar-benar telah merusak dan mendegradasi pemilihan umum yang jujur dan berintegritas. "Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, baik H. Gogo Purman Jaya, S.Sos., dan Drs. Hendro Nakalelo, M.Si. (Nomor Urut 1) maupun Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A., dan Sastra," katanya.

Selain itu, MK juga memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melakukan Pilbup ulang, mulai dari pencalonan hingga pemungutan



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 H. Gogo Purman Jaya, S.Sos., dan Drs. Hendro Nakalelo, M.Si. (baju putih) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A., dan Sastra Jaya didiskualifikasi MK dari kepesertaan Pilkada Barito Utara. (Dok.KPUUD)

suara. "Memerintahkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 harus sudah dilaksanakan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Putusan a quo diucapkan dan selanjutnya menetapkan perolehan suara hasil

Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa melaporkan kepada Mahkamah," ujar Suhartoyo lagi dalam putusannya.

Rp 64 Juta untuk Satu Keluarga

MK menemukan adanya politik uang dengan pembelian suara dalam pemungutan suara ulang (PSU) di

Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Fakta pembelian suara itu ditemukan MK dalam sidang pemeriksaan bukti, di mana terdapat saksi bernama Santi Parida Dewi yang mengaku menerima uang sebesar Rp 64 juta untuk satu keluarga guna mencoblos salah satu pasangan calon.

Mahkamah juga menemukan pasangan calon nomor urut 2 Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya melakukan praktik politik uang dengan pemberian sampai dengan Rp 16 juta untuk satu pemilih. (wid,rls,mk,ant/dya)

KPU Optimistis Pemda Masih Punya Anggaran

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) optimistis anggaran tersedia untuk melakukan pemilihan kepala daerah (Pilkada) ulang untuk pencalonan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

Anggota KPU RI Idham Kholik mengatakan jajarannya di provinsi dan kabupaten bakal segera berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah untuk membahas dana pilkada yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Saya yakin dalam waktu dekat KPU Barito Utara akan mendapatkan respons positif (dari pemerintah daerah). Mudah-mudahan tidak ada hambatan dari sisi pembiayaan," kata Idham saat dihubungi, Rabu (14/5/2025).

Adapun saat ini, tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU adalah mempersiapkan kebijakan teknis untuk melaksanakan pilkada dalam waktu yang terbatas, yakni 90 hari.

Idham menegaskan mereka bakal menerapkan pola pemungutan suara ulang (PSU) dalam hal itu.

Saat ini KPU juga tengah melaksanakan PSU dalam waktu 90 di beberapa daerah, yakni di Kota Palopo, Kabupaten Mahakam Hulu, dan Kabupaten Pesawaran.

"Kami akan coba menggunakan

pola yang sama terhadap pelaksanaan PSU yang 90 hari kemarin," tuturnya.

Idham Holik pun menanggapi soal tindak politik uang yang dilakukan semua pasangan calon dalam Pilkada Barito Utara.

Menurut dia, adanya politik uang bukan akibat kesalahan teknis KPU selaku penyelenggara. "Berkenaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Barito Utara dalam fakta persidangan ini terungkap ini bukan karena faktor teknis penyelenggaraan Pilkada tapi ini di luar hal tersebut," kata Idham.

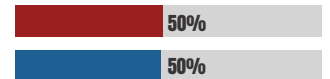
KPU Kalteng Tunggu Petunjuk Resmi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah menunggu petunjuk dari KPU RI mengenai pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Barito Utara tahun 2024 setelah Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan mendiskualifikasi pasangan calon peserta pilkada.

"Terkait putusan MK untuk PSU Pilkada Barito Utara, untuk tindak lanjut putusan MK akan dilaksanakan sesuai ketentuan berdasarkan petunjuk selanjutnya

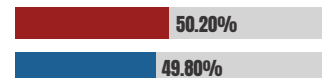
PEROLEHAN SOAL HASIL PILKADA BARITO UTARA

SEBELUM PSU



Data TPS Masuk :270/270 (100%)
Update Terakhir : 2024-12-22 (12:12:05 WIB)
Disajikan JagaSuara 2024

SESUDAH PSU



Data TPS Masuk :270/270 (100%)
Update Terakhir : 2025-03-22 (21:48:06 WIB)
Disajikan JagaSuara 2024

■ Paslon No. Urut 1 ■ Paslon No. Urut 2

dari KPU RI," kata Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah Sastriadi di Palangka Raya, Rabu (14/5/2025).

Pernyataan itu disampaikan Sastriadi menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo, yang menyatakan mendiskualifikasi seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada Barito Utara 2024 karena terbukti saling melakukan politik uang pada pemungutan suara ulang.

Pasangan calon yang diskualifikasi adalah pasangan nomor urut 1 Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo dan pasangan nomor urut 2 Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya.

Saat dikonfirmasi mengenai penyiapan anggaran PSU Pilkada Kabupaten Barito Utara, Sastriadi menyatakan bahwa pelaksanaan PSU dilakukan oleh KPU kabupaten setempat sehingga lembaganya tidak mengajukan anggaran ke Pemerintah Provinsi Kalteng.(wid,rls,ant/dya)



Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie

Proyek pembangunan pabrik kimia chlor alkali-ethylene dichloride (CA-EDC) diduga dipalak jatah proyek Rp5 triliun ternyata Proyek Strategis Nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie telah membekukan Kadin Cilegon, diduga pelakunya.

Pengusaha yang mengaku Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Cilegon 'memalak' proyek senilai Rp5 triliun kepada PT Chengda selaku kontraktor pembangunan PT Chandra Asri Alkali (CAA), milik Chandra Asri Group.

Dikutip dari akun Instagram @AnindyaBakrie, Rabu (14/5/2025), Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyatakan, Kadin menolak segala bentuk tekanan, intimidasi atau pendekatan non-prosedural yang mengganggu kepastian hukum dan keberlangsungan investasi di Indonesia.

Untuk menjaga maruah organisasi dan dukungan terhadap investasi di Indonesia, Kadin melakukan 4 hal. Pertama, membentuk tim verifikasi. "Kadin membentuk tim verifikasi organisasi dan etika untuk melakukan evaluasi langsung terhadap struktur, peran dan tindakan Kadin Kota Cilegon serta afiliasinya," kata Anindya.

Kedua, lanjut Anindya, memberikan rekomendasi sanksi kelembagaan jika terbukti. Sanksi tersebut bisa berupa peringatan tertulis dan teguran keras.

Kedua, pembekuan sementara kewenangan organisasi hingga proses etik selesai. Ketiga, rekomendasi pergantian atau pencabutan mandat organisasi bagi pengurus yang menyalahgunakan nama Kadin.

Ketiga, lanjut Anindya, Kadin menyampaikan laporan resmi terhadap Badan Koordinasi

Penanaman Modal (BKPM) dan pemerintah daerah (pemda).

"Keempat, kami akan menyusun pedoman operasional (SOP) keterlibatan Kadin dalam Proyek Strategis Nasional (PSN)," tulis Anindya.

Selain itu, lanjut penguasa Bakrie Group itu, Kadin akan melakukan audit internal terhadap struktur dan aktivitas Kadin Kota Cilegon dan Provinsi Banten.

"Pihak Kadin Cilegon telah menerima surat undangan rapat penyelesaian permasalahan investasi PT CAA dari Deputi bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM," ungkapnya.

Sebelumnya, video oknum Kadin Cilegon yang diduga meminta jatah proyek Rp5 triliun tanpa tender viral di media sosial (medsos). Permintaan

Anindya Bekukan Kadin Kota Cilegon

Buntut Pemalakan Rp 5 T ke PSN Era Prabowo

jatah ini, terkait pembangunan pabrik Chlor Alkali-Ethylene Dichloride (CA-EDC) senilai Rp15 triliun milik Chandra Asri Group.

Dalam video yang viral, pihak Kadin dan sejumlah asosiasi pengusaha lainnya tengah bertemu perwakilan China Chengda Engineering Co, yang merupakan kontraktor pembangunan pabrik CA-EDC.

Selanjutnya, seseorang yang mengklaim perwakilan Kadin Cilegon terang-terangan meminta jatah proyek dalam investasi tersebut. "Tanpa ada lelang! Porsinya harus jelas, tanpa ada lelang Rp5 triliun untuk Kadin," kata orang itu dengan nada tinggi.

Proyek pembangunan pabrik kimia chlor alkali-ethylene dichloride (CA-EDC) diduga dipalak jatah proyek sebesar Rp5 triliun oleh Kadin Cilegon ternyata merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto.

Pembangunan pabrik kimia itu masuk daftar Proyek Strategis Nasional 2025-2029 melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun

2025-2029, yang diteken Prabowo pada 10 Februari 2025.

Dalam Pepres itu sebutkan pelaksana PSN ini adalah perusahaan swasta.

Proyek ini dikerjakan oleh anak usaha Chandra Asri Group, yaitu PT Chandra Asri Alkali (CAA), dengan nilai investasi sekitar Rp15 triliun.

Pabrik kimia tersebut dirancang untuk memproduksi 400 ribu ton kaustik soda basah dan 500 ribu ton ethylene dichloride (EDC) per tahun.

Produk-produk ini merupakan bahan penting dalam berbagai industri, seperti pemurnian nikel dan alumina untuk baterai kendaraan listrik, industri kertas, rumah tangga, hingga bahan baku pembuatan PVC untuk konstruksi.

Manajemen PT Chandra Asri Alkali yang merupakan pemilik proyek pembangunan Pabrik Kimia Chlor Alkali-Ethylene Dichloride (CA-EDC) akhirnya buka suara. Direktur Legal dan External Affairs Chandra Asri Alkali, Edi Rivai menyampaikan pihaknya akan tetap berkomitmen untuk berinvestasi di dalam negeri.(wid,amt,rls/dya)

Wamen Investasi Desak Polda Banten Cepat Usut

WAKIL Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menyerahkan sepenuhnya kepada Polda Banten untuk mengusut dugaan pemalakan atau permintaan jatah proyek senilai Rp5 triliun yang dilakukan oknum Kadin Cilegon. Pemerintah menyerahkan kepada pemda setempat untuk berkoordinasi dengan pihak pengusaha daerah dengan investor berkaitan dengan kontribusi investasi.

"Kita memang menyesali terhadap kejadian yang terjadi dan itu nanti kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Dalam hal ini nanti Polda Banten yang akan turun memeriksa. Hasilnya kami serahkan kepada aparat hukum," kata Todotua dikutip Rabu (14/5/2025).

"Tetapi intinya ke depannya semoga kejadian ini memberi efek terhadap iklim investasi. Nanti para pelaku usaha daerahnya akan memberikan daftar pengusaha-pengusahanya nanti siapa yang bisa

dan layak untuk berkontribusi nanti pemerintah daerah yang akan melakukan seleksi di situ. Investor pun juga nanti akan memberikan kira-kira daftar pekerjaannya yang bisa dikontribusikan kepada para pelaku usaha daerah," tambahnya.

Kepolisian pun turun tangan dan tengah menyelidiki dugaan pemalakan yang dilakukan oknum Kadin dan ormas tersebut. Selain mengumpulkan informasi, Polda Banten tengah menjadwalkan pemanggilan kepada pihak terkait. Pihak Polres Cilegon sebelumnya telah menggelar mediasi dan memastikan dugaan intimidasi tersebut tak terulang kembali.

"Hanya miskomunikasi saja antar pengusaha asing dan pengusaha lokal di Kota Cilegon. Sudah kita mediasi dan kita ultimatum tidak ada pengancaman, kemudian tidak ada intimidasi. Apabila ada kita tindak tegas. Alhamdulillah kemarin berjalan dengan lancar mediasinya dan kedua

belah pihak juga bersepakat tidak adanya ancaman maupun primanisme seperti itu," kata Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Natanegara.

Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO menilai dugaan oknum Kadin yang meminta jatah proyek senilai Rp5 triliun dari PT Chandra Asri Alkali tanpa proses lelang, termasuk bagian dari aksi premanisme oleh oknum ormas. Hal ini pun dianggap mengganggu iklim investasi serta merusak kepercayaan investor.

"Akan diinvestigasi lebih lanjut gitu. Kami mau garis bawahi lebih dari aspek keamanan dan ormas. Itu yang menjadi satu perhatian sangat penting karena ini juga mengganggu daripada iklim usaha yang baik," kata Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani.(din,ktn,ist/dya)

Sebelumnya, Arab Saudi dalam kesempatan berbeda, juga telah menangkap 2 pria WNI karena mempromosikan jasa haji ilegal untuk musim haji 2025.(wid,rls,ant,ist/dya)

Oleh-oleh Jamaah Haji Bebas Bea Masuk, Maksimal Rp 24,8 Juta/Pengiriman

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), memberikan perlakuan khusus bagi jamaah haji di tahun 2025. Oleh-oleh atau barang pribadi yang dikirim dari Arab Saudi ke Indonesia bebas bea masuk. Syaratnya tidak lebih dari Rp 24,8 juta/pengiriman dan satu jamaah dijatah 2 kali kirim.



Petugas Bea Cukai Bandara Internasional Mohammad Bin Abdul Aziz (AMAA), Madinah, mendokumentasikan 1.000 bungkus rokok milik jamaah haji Indonesia yang disita.

pembebasan ditetapkan hingga USD 2.500. Sementara bagi jamaah haji reguler, tidak ada batasan nilai selama barang tersebut masih dalam kategori barang pribadi yang wajar.

Susila menambahkan, pembebasan ini juga mempertimbangkan batas maksimal bagasi yang ditetapkan maskapai penerbangan, sehingga secara alami jumlah barang bawaan jamaah tetap dalam batas wajar.

"Regulasi ini menjadi bentuk fasilitasi pemerintah agar jamaah tidak terbebani biaya tambahan saat membawa pulang barang-barang pribadi dan oleh-oleh," katanya.

100 Slop Rokok Disita di Madinah

Otoritas Bandara Amir Muhammad Bin Abdul Aziz (AMMA), Madinah, Arab Saudi, menemukan 100 slop rokok pada sembilan koper jamaah haji Indonesia Kelompok Terbang (Kloter) 33 Embarkasi Jakarta-Pondok Gede (JKG-33). Ini merupakan temuan terbesar dalam penyelenggaraan haji tahun ini.

Jamaah JKG-33 mendarat di Bandara AMMA, Madinah, Rabu

(14/5/2025) pukul 04.30 pagi waktu Arab Saudi. Rokok-rokok tersebut ketahuan oleh petugas saat koper para jamaah melewati pemeriksaan barang bawaan di alat X-Ray.

Wakil Kepala Daerah Kerja (Daker) Bandara Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Abdillah Muhammad mengonfirmasi temuan tersebut. Dia menjelaskan, kejadian ini bukan yang pertama sejak kedatangan ibadah haji Indonesia mendarat di Madinah.

"Namun, ini temuan terbesar sejak awal kedatangan sampai saat ini," kata Abdillah, di Bandara AMMA, Madinah, Rabu (14/5/2025).

Pihak otoritas Bandara Madinah langsung menyita rokok-rokok pada koper tersebut. Saat penyitaan, hadir perwakilan PPIH Arab Saudi Daker Bandara untuk menyaksikan proses tersebut. (wud,rls,ant/dya)



Tampak isi koper penuh rokok saat dibuka. (ist)

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2025 yang mulai berlaku Januari lalu, jamaah kini bisa mengirimkan barang sebanyak dua kali dengan nilai pabean maksimal Free on Board (FOB) hingga USD 1.500 atau setara Rp 24,8 juta (kurs Rp 16.542 per USD) per pengiriman tanpa dikenai bea masuk.

Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Susila Brata, menjelaskan bahwa fasilitas ini diberikan pemerintah terhadap kebutuhan jamaah haji, khususnya dalam membawa oleh-oleh dan barang pribadi lainnya dari Makkah dan Madinah.

"Total pembebasan yang diberikan mencapai USD 3.000 per jamaah untuk dua kali pengiriman selama perjalanan haji. Ketentuannya sudah melalui kajian dan dinilai cukup memadai," ujar Susila saat Rapat Panitia Kerja (Panja) bersama Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Ketentuan barang kiriman jamaah haji, yakni harus diberitahukan ke Kantor Pabean oleh penyelenggara Pos menggunakan consignment note (CN), penyelenggara Pos Barang Kiriman Jamaah Haji mesti menyampaikan bukti kerja sama/ kontrak dengan agen/pengangkut di luar negeri, pengirim merupakan jamaah Haji.

Setelah itu, CN diberitahukan paling cepat setelah tanggal pemberangkatan kloter pertama dan paling lama 30 hari setelah kepulangan kloter terakhir, dikemas dalam kemasan paling besar berukuran panjang 60 centimeter (cm) dan tinggi 80 cm, dan barang kiriman tidak lebih dari satu kemasan untuk setiap pengiriman.

Tak hanya barang kiriman, barang penumpang yang dibawa langsung oleh jamaah haji juga mendapatkan pembebasan bea masuk.

Untuk jamaah haji khusus, nilai

Jamaah Indonesia Rentan Masalah Kesehatan Jiwa

DATA pelayanan kesehatan yang dihimpun oleh Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Madinah menyebutkan reaksi stress akut dan gangguan penyesuaian diri merupakan diagnosis penyakit terbanyak yang dialami pasien jamaah haji gelombang 1. Namun juga ditemukan masalah fisik seperti gangguan jantung, hipertensi, dan diabetes.

Dokter spesialis jiwa di KKHI Madinah, dr Kusufia Mirantri, SpKJ mengungkapkan bahwa tekanan fisik, perubahan lingkungan drastis, kelelahan, serta perpisahan sementara dan/atau tanpa pendampingan dari keluarga dapat menjadi pemicu stress signifikan bagi jamaah.

"Banyak jamaah, terutama lansia atau mereka yang memiliki kerentanan sebelumnya, mengalami kesulitan beradaptasi. Stress dan gangguan penyesuaian ini dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari gangguan tidur, kecemasan berlebih, hingga gejala psikosomatis," ujarnya dalam

keterangan tertulis dikutip dari Sehat Negeriku, Rabu (14/5/2025).

dr Kusufia menekankan penting bagi sesama jamaah maupun pendamping atau keluarga untuk mengenali tanda-tanda awal masalah kejiwaan agar dapat memberikan dukungan dan mencari bantuan profesional.

Ada beberapa tanda-tanda gangguan masalah kejiwaan yang bisa dikenali, pertama dari perubahan perilaku yang mencolok.

"Coba perhatikan, jika ada jamaah yang biasanya ceria dan mudah bergaul tiba-tiba menjadi mudah tersinggung, atau sebaliknya, menarik diri secara ekstrem, lebih suka menyendiri, dan enggan berinteraksi dengan orang lain," ujar dokter yang akrab disapa dr Upi ini.

Kedua, kesulitan tidur atau insomnia. Ketiga, adanya kecemasan atau ketakutan yang berlebihan.



(Ilustrasi) Petugas membantu jamaah calon haji lansia asal Kota Semarang yang menggunakan kursi roda saat masuk di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (9/5/2025). (ant)

Merasa sedikit cemas di lingkungan baru adalah wajar. Namun, jika kecemasan tersebut menjadi berlebihan, tidak rasional, dan mengganggu aktivitas sehari-hari misalnya, takut keluar kamar, takut ke masjid meski ditemani, atau panik berlebihan saat berada di keramaian, ini memerlukan perhatian serius.

Keempat, kebingungan terhadap tempat, waktu, dan orang (disorientasi). Jamaah yang mengalami masalah kejiwaan mungkin menunjukkan tanda-tanda kebingungan. (wid,ist,rls/dya)

Wali Kota Malang: PKL Beromzet Rp 5 Juta/Bulan ke Bawah Tak Dikenakan Pajak



Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. (Santi/Lentera)

MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memastikan pedagang kaki lima (PKL) dengan omzet kecil tidak akan dikenakan pajak. Hal ini menyusul rencana revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyatakan ketentuan pajak untuk PKL dengan omzet Rp 5 juta per bulan,

dinilai terlalu membebani dan tidak akan diterapkan selama dirinya menjabat.

"Di Perda lama, itu disebut PKL yang omzetnya Rp 5 juta per bulan (dikenakan pajak). Saya tidak melaksanakan. Karena saya kira itu terlalu berat bagi PKL tersebut," ujar Wahyu, Rabu (14/5/2025).

Sebagai bentuk konkret keberpihakannya kepada sektor usaha kecil, Wahyu mengaku telah mengajukan usulan perubahan Perda tersebut kepada DPRD Kota Malang.

Dalam draft revisi yang tengah dibahas, ambang batas omzet yang dikenai pajak akan dinaikkan dari Rp 5 juta menjadi Rp 10 juta per bulan.

Namun Wahyu menegaskan, dirinya tetap akan bersikap selektif meskipun revisi Perda disetujui DPRD.

Ia menyatakan tidak akan menerapkan ketentuan tersebut jika dinilai masih berpotensi merugikan PKL.

"Meskipun nanti sudah didok DPRD, tapi kalau menurut saya belum sesuai dan masih memberatkan, tetap tidak saya laksanakan. Itu merupakan kewenangan saya sebagai wali kota. Ini sebagai bentuk saya pro kepada PKL," tegasnya.

Wahyu juga menampik anggapan sikapnya tersebut akan berpotensi melanggar aturan. Dijelaskannya, langkah untuk menunda pelaksanaan Perda PDRD 2023 sebelumnya juga telah melalui proses hukum yang sah, yaitu dengan mengajukan perubahan melalui mekanisme peraturan.

"Buktinya Perda 2023 (penerapan pajak untuk PKL dengan omzet Rp5 juta per bulan) tidak saya jalankan. Tapi supaya tidak menyalahi aturan, saya minta ada penyesuaian. Dalam pembahasan itu akhirnya nanti akan dinaikkan menjadi Rp 10 juta," jelasnya.

Sebelumnya, sempat muncul keresahan di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil, terutama di sektor kuliner malam, yang mengkhawatirkan bakal dikenakan pajak dalam

rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menanggapi hal ini, Wahyu memastikan upaya optimalisasi PAD tidak bisa dilakukan secara sembarangan tanpa kajian mendalam.

"Optimalisasi PAD itu penting, tapi tidak bisa serta merta. Harus ada pertimbangan yang matang dan didahului pendataan yang detail. Kemarin Bappeda juga turun, itu hanya untuk mendata potensi, berdasarkan masukan dari DPRD," terang Wahyu.

Ia menambahkan, kebijakan fiskal daerah harus dijalankan secara adil dan tidak boleh justru menekan kelompok ekonomi lemah. Karena itu, penyesuaian aturan harus disertai dengan sensitivitas sosial, terutama terhadap pelaku usaha di sektor informal.

Pemkot Malang, lanjutnya, akan terus mengedepankan pendekatan humanis dan tidak kaku dalam menetapkan kebijakan perpajakan. Langkah ini juga sejalan dengan misi pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi kerakyatan dan memberikan ruang tumbuh bagi UMKM serta PKL. (santi/dya)

Alokasi DBHCHT Sektor Kesehatan Kabupaten Malang Naik Jadi 60%

MALANG - Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di bidang kesehatan, Kabupaten Malang naik menjadi 60 persen di tahun anggaran 2025 ini. Pembahasan alokasi tersebut akan difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana layanan kesehatan. Selain itu juga pelunasan iuran jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran daerah (PBID) yang sempat terputus.

"Sebenarnya kalau kenaikan di kami, di Permenkeunya itu 40 persen. Tetapi menjadi 60 persen itu salah satunya adalah terkait pembiayaan jaminan kesehatan yang kemarin sempat diputus," ujar Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang, Ivan Drie, usai menghadiri podcast sosialisasi DBHCHT, Rabu (14/5/2024).

Ivan merinci, pada 2025 ini, alokasi DBHCHT akan dimanfaatkan untuk berbagai proyek prioritas di bidang kesehatan. Di antaranya pembangunan sarana dan prasarana RSUD Lawang senilai Rp10,067 miliar. Kemudian untuk peningkatan fasilitas sanitasi dan pengelolaan limbah serta

air bersih di Puskesmas Poncokusumo sebesar Rp1,195 miliar.

Selain itu, RSUD Ngantang juga akan mendapatkan dana sebesar Rp3,5 miliar untuk rehabilitasi dan pemeliharaan gedung. Serta tambahan Rp4,7 miliar untuk pengadaan alat kesehatan penunjang medis di rumah sakit yang sama.

"Kemudian terakhir itu terkait pembayaran iuran jaminan kesehatan yang kemarin sempat terputus. Insyaallah di tahun ini Pemkab akan melunasi sebesar kurang lebih Rp44 miliar 43 juta itu," katanya.

Sementara itu, Pemeriksa Bea Cukai Ahli Pertama dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Malang, Agnita Aditya Wardani mengapresiasi langkah Pemkab Malang. Yang menggelar sosialisasi penggunaan DBHCHT secara terbuka kepada publik melalui media podcast.

"Ini cara yang positif dan sangat baik. Masyarakat bisa mengetahui langsung untuk apa saja DBHCHT digunakan, termasuk capaian di bidang

kesehatan. Dari total DBHCHT yang diterima sebesar Rp125 miliar, Rp95 miliar di antaranya memang dialokasikan untuk sektor kesehatan," terang Agnita.

Meski terjadi peningkatan alokasi di sektor kesehatan, namun Agnita menyebutkan total DBHCHT yang diterima Kabupaten Malang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

"Kalau ingin tahu penyebab turunnya, bisa ditanyakan ke Bapenda. Karena kami hanya mengurus bagian penerimaan saja," tambah Agnita.

Terpisah, Kasubsi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksekusi Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Fikri Fawaid juga menyampaikan pentingnya penyampaian informasi DBHCHT secara utuh dan resmi.



Podcast melalui radio, dalam rangka penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat Kabupaten Malang, Rabu (14/5/2025). (Santi/Lentera)

Menurutnya, masyarakat kerap kali hanya mendapat potongan informasi dari media sosial, sehingga menimbulkan persepsi yang kurang tepat.

"Podcast seperti ini sangat dibutuhkan agar masyarakat tahu dari mana asal anggaran, bagaimana proses pengalokasiannya, dan ke mana saja dana itu disalurkan," ujarnya. (Santi/Dya)



Warga berjalan di dekat gedung yang terkena serangan pesawat nirawak Rusia, di pinggiran Kyiv, Ukraina Rabu, (7/5/2025). (Reuters)

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan kesiapannya untuk menanti Presiden Rusia Vladimir Putin di Turki pada Kamis (15/5/2025) guna melangsungkan perundingan damai. Zelensky telah mengonfirmasi akan hadir dalam pertemuan tersebut, sementara hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak Putin.

tekanan kuat pada kedua pihak untuk datang ke meja perundingan sejak Trump kembali menjabat pada Januari lalu, dengan janji untuk mengakhiri perang.

Trump mengatakan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio akan menghadiri pertemuan yang direncanakan antara Ukraina dan

Dikutip dari Channel News Asia, Rabu (14/5/2025), Putin sejauh ini belum mengatakan apakah dirinya akan hadir dalam perundingan tersebut, setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendesak kedua belah pihak untuk hadir sebagai bagian dari upaya Washington menghentikan perang tersebut.

Zelensky mengatakan kepada wartawan di Kyiv bahwa dirinya akan berada di Ankara pada Kamis (15/5/2025) untuk melakukan perundingan dengan Moskow.

Dia akan bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan keduanya akan menunggu Putin untuk datang.

Dikatakan oleh Zelensky bahwa dirinya akan "melakukan segalanya untuk menyetujui gencatan senjata, karena dengan (Putin) itu, saya harus merundingkan gencatan senjata, karena hanya dia yang dapat memutuskannya".

Pemimpin Ukraina tersebut menambahkan bahwa jika pemimpin Rusia tidak muncul, maka para pemimpin Eropa dan AS harus menindaklanjutinya dengan ancaman sanksi tambahan dan sanksi berat terhadap Rusia.

Washington telah memberikan

Trump Diminta Bantu Realisasikan Pertemuan

PRESIDEN Ukraina Volodymyr Zelensky meminta bantuan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk memfasilitasi pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin yang direncanakan berlangsung di Turki pada Kamis (15/5/2025).

Ia menilai pemimpin Kremlin itu tidak serius mengakhiri perang yang telah berlangsung sejak Februari 2022.

"Putin tidak ingin perang berakhir, tidak menginginkan gencatan senjata, tidak menginginkan negosiasi apa pun," kata Zelensky.

"Namun saya akan melakukan segalanya untuk memastikan bahwa pertemuan ini berlangsung," ungkap dia, dikutip dari AFP pada Rabu (14/5/2025).

Zelensky juga menyatakan bahwa pertemuan itu harus langsung dengan Putin. "Ini perangnya. Oleh karena itu, negosiasi harus dilakukan dengan-nya," ujarnya.

Sementara itu Trump yang menjabat sejak Januari 2025 sebelumnya berjanji akan mengakhiri perang Rusia-Ukraina secara cepat. Namun, belakangan ia mulai frustrasi terhadap kurangnya kompromi antara Kyiv dan Moskow.

"Saya tidak tahu keputusan presiden AS, tetapi jika ia mengonfirmasi partisipasinya, saya pikir itu

Zelensky Tunggu Putin di Turki untuk Dialog Damai

Rusia di Turki, dan mungkin akan ada hasil yang baik.

Para pemimpin Eropa mengancam akan menjatuhkan sanksi besar yang memerlukan dukungan AS terhadap Putin jika dia tidak menyetujui usulan gencatan senjata selama 30 hari di Ukraina dalam beberapa hari ke depan.

Ancaman itu gagal menggerakkan Putin, yang malah menyerukan pembicaraan langsung dengan Ukraina di Istanbul pada Kamis (15/5/2025).

Kanselir Jerman Friedrich Merz

mengulangi ancaman sanksi itu pada Selasa (13/5/2025), dengan mengatakan bahwa "jika tidak ada kemajuan nyata minggu ini, kami ingin bekerja sama di tingkat Eropa untuk pengetatan sanksi yang signifikan".

Sementara Presiden Prancis Emmanuel Macron juga mengatakan dirinya mendukung penerapan sanksi baru terhadap Rusia dalam beberapa hari mendatang, jika Moskow gagal menyetujui gencatan senjata, dengan sektor keuangan dan minyak dan gas sebagai target yang mungkin. (Channel News Asia, AFP, ist/nei)



Presiden AS Donald Trump bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di Gedung Putih di Washington, DC, AS, 28 Februari 2025. (Reuters)

akan memberikan dorongan tambahan bagi Putin untuk datang," ujar Zelensky dalam konferensi pers.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dijadwalkan masuk dalam delegasi Amerika Serikat yang akan hadir dalam pembicaraan di Istanbul.

Di tengah upaya diplomasi, Rusia tetap melanjutkan serangan militer. Dua warga sipil dilaporkan tewas dalam serangan udara di wilayah Kharkiv, Ukraina timur.

Zelensky menegaskan agar AS dan negara-negara Barat menjatuhkan sanksi paling keras bila Putin mangkir dari pertemuan.

"Penolakan untuk hadir akan menjadi sinyal yang jelas bahwa mereka tidak menginginkan dan

tidak akan mengakhiri perang," tegasnya.

Sementara itu, Moskow belum mengonfirmasi siapa yang akan dikirim ke perundingan. Juru bicara Kremlin enggan memberikan kepastian.

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov menyatakan, perundingan akan digunakan untuk mengangkat kembali tujuan utama Rusia, yaitu "de-Nazifikasi" Ukraina dan penggabungan wilayah baru ke dalam Federasi Rusia.

Narasi tersebut ditolak oleh Kyiv dan negara-negara Barat, yang menyebutnya sebagai upaya perampasan wilayah secara paksa. (AFP, ist/nei)

Mental Load

Beban Tak Terlihat yang Bikin Perempuan Lelah

Sebagai perempuan, kita kerap dihadapkan pada berbagai **tantangan** jawab sekaligus—mulai dari pekerjaan, urusan keluarga, hingga mengelola rumah tangga. Tekanan ini tak hanya menguras tenaga secara fisik, tetapi juga membebani secara mental.

Setiap hari, begitu banyak hal yang harus dipikirkan, direncanakan, dan diselesaikan, yang pada akhirnya menumpuk menjadi beban pikiran tak kasatmata yang dikenal dengan istilah mental load.

Mental load bukan sekadar tentang siapa yang mengerjakan tugas rumah, melainkan lebih pada siapa yang bertanggung jawab untuk mengingat, merencanakan, dan mengatur semuanya. Beban ini sering kali tak tampak oleh orang lain, namun sangat membebani bagi mereka yang harus menanggungnya.

Mengatur jadwal anak, memastikan rumah selalu tertata, memikirkan apa yang harus dimasak hari ini, atau kapan sebaiknya membayar tagihan. Semuanya termasuk dalam daftar mental load yang sering membuat perempuan merasa cemas dan kewalahan, bahkan tanpa menyadarinya.

Mengapa Perempuan Rentan Mengalami Mental Load?

Mental load atau cognitive labor adalah beban mental yang muncul ketika kita harus mengelola tugas-tugas sehari-hari, mulai dari

merencanakan hingga memonitor tugas-tugas tersebut. Mental load sering kali dikaitkan dengan perempuan karena adanya ekspektasi sosial yang menempatkan mereka sebagai 'manajer rumah tangga.' Perempuan diharapkan untuk selalu tahu apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, dan memastikan semuanya berjalan lancar.

Bahkan dalam hubungan, perempuan sering kali lebih banyak mengambil peran dalam mengingat dan mengatur berbagai hal kecil, mulai dari jadwal liburan, kebutuhan rumah tangga, hingga urusan kesehatan seluruh anggota keluarga. Meski sering dikaitkan dengan ibu rumah tangga, mental load juga bisa dialami oleh perempuan yang bekerja, perempuan single, bahkan pelajar, dalam berbagai bentuk tekanan yang lain. Mengapa Mental Load Bisa Menyebabkan Kelelahan Emosional?

Ketika mental load terus menumpuk tanpa jeda, perempuan bisa mengalami kelelahan emosional serius yang mempengaruhi kesehatan mental dan fisik.

Kamu akan merasa lelah dan stres meskipun tidak melakukan pekerjaan fisik yang berat karena pikiran yang terus menerus aktif, mencari solusi, dan mengingat tugas yang belum selesai. Jika tidak ditangani, stres berkepanjangan akibat mental load dapat menyebabkan gangguan tidur, kecemasan, bahkan depresi pada perempuan.

Cara Mengelola Mental Load

Komunikasikan Beban Pikiranmu

Jangan ragu untuk berbicara dengan pasangan atau anggota keluarga lainnya tentang beban yang kamu rasakan. Kadang, orang-orang di sekitar kita tidak menyadari seberapa banyak yang kita pikirkan dan urus setiap hari apabila kita tidak mengkomunikasikannya.

Delegasikan Tugas dengan Orang Lain

Salah satu cara untuk mengurangi mental load adalah dengan membagi tanggung jawab dengan pasangan atau anggota keluarga lainnya. Cobalah untuk berdiskusi dengan pasangan atau anggota keluarga lain tentang tugas apa saja yang bisa dibagi. Kamu bisa memulainya dari hal kecil, seperti membagi jadwal mengantar anak sekolah, belanja bahan makanan, hingga membersihkan rumah.

Tetapkan Batasan Diri

Penting untuk dapat memahami batasan diri. Jangan merasa segalanya harus selalu sempurna atau mengurus semuanya sendirian. Ada kalanya, kamu perlu mengatakan tidak pada beberapa hal dan memberi diri sendiri waktu istirahat untuk menikmati hal-hal yang kamu sukai.

Melatih Mindfulness

Melatih mindfulness dalam

keseharian bisa membantu kamu lebih fokus pada saat ini dan mengurangi kecemasan tentang apa yang akan datang. Ketika kamu belajar untuk lebih hadir dalam setiap momen, mental load bisa sedikit berkurang karena kamu tidak lagi terus-menerus terjebak dalam pikiran tentang masa depan.

Mental Load dan Dampaknya pada Kesehatan Mental

Elizabeth Aviv, kandidat Doktor di University of Southern California, bersama kedua temannya, menemukan kerja kognitif dan emosional berlebihan memperburuk kondisi mental. Dalam artikel bertajuk "Gendered Mental Labor: A Systematic Literature Review on the Cognitive Dimension of Unpaid Work Within the Household and Childcare" (2024) ia menjelaskan, mental load berkaitan dengan depresi, stres, burnout, hingga kondisi hubungan yang buruk.

Khadijah Aulia, Psikolog Our Me Time dan Bicarakan Indonesia, turut mengamini hal ini. Kata dia, beban "printilan" rumah tangga yang secara kultural dilekatkan pada perempuan, berpengaruh pada kondisi kesehatan mental mereka.

tekanan yang selama ini mungkin terasa menumpuk dan melelahkan. Ingat, kamu tidak harus selalu melakukan semuanya sendiri. Tidak apa-apa untuk meminta bantuan, tidak apa-apa untuk beristirahat. (nei,ist/dya)



Adopsi AI di Papua, Tantangan Ketersediaan SDM Lokal



Pemerintah perlu merancang peta jalan yang komprehensif serta melibatkan SDM lokal guna mendorong pemerataan adopsi Artificial Intelligence (AI) hingga ke kawasan Indonesia Timur, termasuk Papua.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa penetrasi kecerdasan buatan (AI) berlangsung dengan cepat dan meluas, bahkan telah menjangkau wilayah Indonesia Timur, termasuk Papua.

Meutya menyampaikan pencapaian tersebut di depan perwakilan para petinggi teknologi yang tengah berkumpul di acara forum internasional "Machines Can See 2025" di Dubai, bulan lalu.

Dia mengatakan sebagai bagian dari semangat inklusivitas, Indonesia membangun pusat keunggulan AI di beberapa kota, termasuk Bandung, Surabaya, dan Papua. Kehadiran AI di Papua mencerminkan semangat inklusivitas yang ingin dibawa pemerintah.

Mengenai hal tersebut, Ketua Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (KORIKA) Hammam Rizal mengatakan pentingnya kehadiran peta jalan dan keberanian untuk mengeksekusi road map yang dilahirkan untuk mengoptimalkan adopsi AI di Papua.

Dia juga mengingatkan tentang pentingnya keterlibatan talenta lokal dalam mendorong AI di wilayah timur Indonesia. "Untuk Papua, strategi AI itu harus bisa dilaksanakan, termasuk SDM digital. Anak-anak Papua dapat menjadi talenta unggul di bidang AI," kata Hammam kepada Bisnis, Senin (12/5/2025).

Kesiapan SDM dalam Pengembangan AI

PricewaterhouseCoopers (PwC) dalam laporannya pada 2024 menyebut bahwa penerapan AI tidak dapat dilakukan secara instan. Terdapat beberapa hal yang harus disiapkan mulai dari infrastruktur hingga SDM.

April 2024, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan rencananya untuk melatih 210.000 talenta digital di bidang AI, untuk mempercepat transformasi digital sekaligus menangkap peluang besar dari AI.

Rencana tersebut masih terus dijalankan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menekankan dalam mendorong adopsi teknologi di Papua, pemerintah dan swasta harus sensitif terhadap konteks budaya lokal.

Talenta lokal perlu dilibatkan secara inklusif untuk memastikan teknologi relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Selain itu, menurutnya, penting bagi pemerintah dan swasta untuk meningkatkan literasi bagi masyarakat sekitar agar manfaat kehadiran AI memberi dampak yang lebih optimal.

Papua adalah wilayah strategis dengan sumber daya alam melimpah. AI dapat mempercepat eksploitasi yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada infrastruktur di Jawa.

Membangun pusat AI di Papua menunjukkan komitmen untuk tidak memusatkan kemajuan teknologi di Jawa, yang sering kali memperlebar kesenjangan regional," kata Heru.

Senada, Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Yosef M. Edward mengatakan keterlibatan talenta lokal sangat penting.

Menurutnya, menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk membangun AI berdaulat, yang dibuat di Indonesia, dari dan untuk masyarakat Indonesia.

Dia meyakini bahwa masyarakat di Papua memiliki keinginan yang kuat untuk mempelajari dan memanfaatkan AI untuk berbagai macam kebutuhan. (nei,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL.

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Side Hustle Anti Ribet untuk Wanita Karier

Menjalani peran sebagai wanita karier di masa kini bukanlah perkara sederhana, terutama dengan beban pekerjaan yang semakin menantang. Hal inilah yang membuat banyak wanita mulai mempertimbangkan peluang usaha sampingan sebagai alternatif solusi.

Selain untuk menambah pemasukan, bisnis sampingan juga bisa menjadi cara seru untuk menyalurkan minat dan bakat di luar pekerjaan utama. Dengan begitu, kamu tetap bisa merasa produktif sekaligus punya ruang untuk berkembang lewat hal-hal yang kamu sukai.

Nah, jika kamu sedang mencari ide usaha yang praktis dan bisa dilakukan di sela-sela kesibukan, berikut beberapa bisnis sampingan yang bisa dipilih.

Bisnis Sampingan untuk Wanita Karier

Menurut ZenBusiness, wanita karier sering kali mencari peluang bisnis sampingan yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan jadwal padat mereka. Berdasarkan kebutuhan ini, berikut daftar pekerjaan yang mungkin cocok untuk dijalani:

Makeup Artist

Keterampilan di bidang tata rias bisa jadi peluang bisnis sampingan sebagai makeup artist. Tak hanya bisa dilakukan di waktu senggang, bisnis ini juga punya peluang besar untuk berkembang. Terutama jika ada permintaan makeup untuk acara-acara spesial seperti pernikahan atau pesta. Nah, yang menarik, kamu bisa memulai bisnis ini tanpa

harus memiliki studio besar. Cukup dengan perlengkapan makeup yang dimiliki dan keahlian yang mumpuni, kamu sudah bisa mulai menjalankan jasa ini secara mandiri.

Affiliate Marketing

Affiliate marketing telah tumbuh pesat dan kini menjadi salah satu peluang bisnis sampingan yang menarik, bahkan untuk wanita karier yang sibuk. Menurut laporan Influencer Marketing Hub, industri affiliate marketing diperkirakan mencapai nilai \$14,3 miliar secara global pada tahun 2023 dan terus tumbuh hingga \$15,7 miliar pada tahun 2024. Jika tertarik menjalankannya, pekerjaan ini mengharuskan kamu untuk mempromosikan suatu produk atau layanan orang lain lewat link afiliasi di media sosial. Nah, setiap kali ada pembelian melalui link tersebut, kamu akan mendapat komisi.

Berjualan di E-commerce

Menjalankan toko di e-commerce bisa menjadi peluang bisnis sampingan yang menarik, bahkan untuk wanita karier yang sibuk. Dengan memanfaatkan platform e-commerce untuk menjual berbagai produk, mulai dari fashion, aksesoris, hingga barang-barang unik yang sedang tren.

Dropshipper

Jika kamu ingin bisnis yang lebih praktis tanpa perlu repot mengelola stok barang, menjadi dropshipper bisa jadi pilihan yang pas. Pasalnya, kamu cukup menjual produk dari supplier, menetapkan harga sendiri, dan fokus pada pemasaran serta branding, tanpa perlu khawatir soal pengiriman barang.

Desain Grafis Freelance

Bagi wanita karier yang memiliki kreativitas dan keahlian dalam desain visual, desainer grafis freelance bisa menjadi bisnis sampingan yang menguntungkan. Terlebih, permintaan untuk desain visual, mulai dari logo hingga materi pemasaran terus berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Blogging

Mulailah perjalanan kreatif dan ekspresikan pemikiran, keahlian, dan minat Anda melalui blogging. Dedikasikan waktu untuk menulis konten yang menarik, membangun audiens, dan membina hubungan dengan pembaca. Meskipun potensi penghasilan bervariasi, blogger sukses dapat memperoleh penghasilan melalui iklan, postingan bersponsor, pemasaran afiliasi, dan bahkan kolaborasi dengan merek.

Mengapa Anda Harus Mulai Melakukan Pekerjaan Sampingan?

Di dunia yang serba cepat dan

dinamis saat ini, bisnis sampingan telah menjadi sebuah terobosan baru, menawarkan banyak manfaat yang lebih dari sekadar penghasilan tambahan. Jika Anda mempertimbangkan ide untuk memulai usaha sampingan, bersiaplah untuk membuka banyak kemungkinan dan peluang. Berikut adalah lima alasan kuat mengapa Anda harus terjun ke dunia sampingan:

Kebebasan dan Fleksibilitas Finansial

Pekerjaan sampingan memberikan jalan untuk meningkatkan penghasilan Anda, baik Anda menabung untuk liburan impian, melunasi hutang, atau sekadar ingin meningkatkan keamanan finansial Anda. Dengan mendiversifikasi sumber pendapatan, Anda mendapatkan kendali lebih besar atas keuangan Anda, memberdayakan Anda untuk mencapai tujuan keuangan Anda dan menikmati fleksibilitas untuk menjalani hidup sesuai keinginan Anda sendiri.

Kejar Gairah Anda

Pekerjaan sampingan memungkinkan Anda mengeksplorasi minat Anda dan mengubahnya menjadi usaha yang menghasilkan keuntungan. Baik Anda seorang seniman yang bercita-cita tinggi, penggemar kebugaran, atau koki ulung, pekerjaan sampingan Anda dapat menjadi platform untuk mengekspresikan kreativitas, berbagi keahlian, dan memonetisasi hobi Anda. Ini adalah kesempatan untuk melakukan apa yang Anda sukai

dan mendapatkan penghasilan – situasi yang saling menguntungkan! (nei,ist/dya)

Peliknya Polemik (dari Hal 1)

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menyinggung polemik dugaan ijazah palsu yang tengah ramai baru-baru ini.

Dalam pidato sambutannya di acara peluncuran buku 'Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)' di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025), Mega tak menyinggung langsung nama Presiden ketujuh RI, Joko Widodo.

Namun, dia menantang agar pihak yang sedang digugat, tak perlu ragu menunjukkan ijazahnya jika asli.

"Orang banyak kok sekarang gonjang-gangjing urusan ijazah, bener opo enggak? Ya kok susah amat ya, kan kalau di ijazah betul gitu, kasih aja, 'ini ijazah saya' gitu loh," kata Mega.

Megawati pada kesempatan itu mengatakan bahwa BRIN memiliki ribuan peneliti. Menurut dia, BRIN saat ini total memiliki 8.144 peneliti.

Dia meyakini ribuan peneliti itu adalah orang-orang pintar. Namun, dia mengaku tak mau kalah dan meminta agar ia menjalani tes IQ dan EQ.

"Saya mesti cerita sedikit pengalaman kenapa Pak Bambang Kesowo nulis (buku) Sebegini tebalnya. Karena ketika saya ditugasi ke BRIN ini, terus saya punya researcher itu 8.144, wah saya pusing kepala. Kan ini pasti orang pintar semua ini," kata Mega.

"Wah, tapi saya tidak mau kalah. Saya suruh Pak Handoko, saya suruh di-testing dengan ilmu psikologi. Jadi IQ-nya sama EQ-nya intelligence quotient sama emotional quotient. Supaya apa? Ini benar pintar atau ngerepek ini," imbuhnya.

Diketahui, ijazah Jokowi yang dikeluarkan Universitas Gadjah Mada (UGM) dituding palsu. Jokowi sudah melaporkan tuduhan ini ke Polda Metro Jaya. Di sisi lain ada pula laporan yang masuk ke Bareskrim Polri soal ijazah Jokowi ini. UGM juga sudah beberapa kali membantah tuduhan keponsan ijazah Jokowi.

Mediasi Gugatan Perdata Buntu

Sementara, mediasi gugatan perdata keriga terkait keabsahan ijazah Presiden ketujuh RI, Joko Widodo kembali gag. Muhammad Taufiq selaku pihak penggugat dan Jokowi sebagai tergugat gagal mencapai kata sepakat di mediasi perkara No: 99/Pdt.G/2025/PN Skt yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta, Rabu (14/5/2025).

Mediasi ketiga ini dipimpin oleh oleh mediator non-hakim seorang guru besar Universitas Sebelas Maret (UNS), Prof. Adi Sulistyono. Taufiq selaku penggugat absen karena sedang mengajar di salah satu universitas di Semarang.

Jokowi lagi-lagi absen di sidang mediasi yang ketiga ini. Ia diwakili kuasa hukumnya, YB Irpan. Selain Jokowi, Rektor UGM, Ova Emilia berhalangan hadir. Sedangkan tergugat lainnya, KPU Surakarta, SMA Negeri 6 Surakarta, dihadiri oleh prinsipal masing-masing.

YB Irpan menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi permintaan Taufiq, yaitu agar Jokowi menunjukkan ijazahnya kepada publik.

"Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat 1 (Jokowi) melalui kuasa hukumnya telah menyatakan bahwa untuk penyelesaian sengketa melalui mediasi dinyatakan deadlock," kata YB Irpan usai sidang.

Ia memastikan kliennya tidak akan menempuh jalan damai dalam menghadapi gugatan Taufiq. "Tergugat Satu (Jokowi) sudah menutup pintu untuk damai. Karena kami punya keyakinan atas keabsahan ijazah Pak Jokowi," kata dia.

Menurutnya, keaslian ijazah Jokowi sudah dipastikan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) dan SMA Negeri 6 Surakarta.

"Itu sudah cukup. tidak perlu adanya uji laboratorium seperti opini yang selama ini dibangun oleh pihak-pihak yang menginginkan agar itu dilakukan uji lab," kata dia.

Dengan buntutnya mediasi tersebut, YB Irpan memastikan pihaknya tidak akan menghadapi

mediasi selanjutnya. Mereka menginginkan agar perkara ijazah ini dilanjutkan dengan proses persidangan oleh hakim.

"Karena kami sama sekali tidak akan pernah mau memenuhi, kami akan beri kesempatan dalam persidangan pemeriksaan pokok perkara supaya penggugat leluasa membuktikan dalih gugatannya bahwa ijazah Pak Jokowi palsu," kata dia.

Irpan menambahkan mediasi keempat yang digelar Rabu (21/5/2025) pekan depan tetap akan digelar tanpa pihak Jokowi.

"Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 4 (KPU Surakarta, SMAN 6 Surakarta, dan UGM) masih diminta kehadirannya karena masih ada hal-hal yang perlu dilakukan pembahasan bersama-sama dengan penggugat dan mediator," kata Irpan.

Sementara itu, Kuasa Hukum Taufiq, Andika Dian Prasetya mengatakan kliennya masih membuka diri untuk kompromi. Hanya saja pihaknya tetap mengajukan sejumlah syarat yang dianggap penting.

"Tapi kalau dari Pak Jokowi dari kemarin sudah bilang kalau deadlock, dan ingin segera melanjutkan (persidangan pokok perkara)," kata dia.

Terpisah, Pihak penggugat jajaran rektorat UGM buka suara perihal gugatan yang dilayangkannya ke Pengadilan Negeri Sleman dengan tudingan perbuatan melawan hukum menyangkut polemik ijazah Presiden

ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Identitas penggugat dalam hal ini adalah Komardin, seorang advokat yang berdomisili di Makassar, Sulawesi Selatan.

Saat dikonfirmasi, Komardin mengaku gugatan dilayangkan dengan dasar penilaiannya bahwa UGM selama ini tak memberikan informasi perihal ijazah hingga skripsi Jokowi berdasarkan ketentuan undang-undang.

"Jadi sekarang ini kan skripsi palsu lah, ijazah palsu lah, sekarang supaya tidak menjadi gaduh di negara ini ya kita buktikan lewat pengadilan, akibat negara ini menjadi gaduh, ini kan nilai rupiah kita anjlok, kalau ini anjlok semua sektor rusak," kata Komardin saat dihubungi, Rabu (14/5/2025).

Komardin mengaku dirinya tak ada urusan dengan Jokowi. Baginya, UGM-lah yang harus bertanggung jawab mengembalikan kondusifitas atas timbulnya kegaduhan di tengah publik hingga memicu anjloknya nilai tukar Rupiah.

"Makanya saya tuntutan itu UGM kerugian materiil itu ada Rp69 triliun, kerugian imateriil itu Rp1.000 triliun," ucapnya.

"Dibayar ke negara bukan kepada saya," sambungnya menegaskan.

Nominal kerugian itu Komardin dasarkan pada kalkulasi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS (USD) yang dua tahun lalu masih Rp15.500 per dolar AS dan kini telah menyentuh Rp16.700 per dolar AS. (din wud, ant, rla, ist/dya)

Kasmudjo Mengaku Tak Siap Hadapi Gugatan

Ir. Kasmudjo yang merupakan pembimbing akademik Joko Widodo semasa kuliah digugat ke Pengadilan Negeri (PN) Sleman. Gugatan itu terkait dengan ijazah Joko Widodo (Jokowi), Presiden ke-7 RI. Menanggapi itu, Kasmudjo mengaku tidak siap, hanya saja dia akan mengikuti arahan dari pihak Universitas Gadjah Mada (UGM), yang juga jadi pihak tergugat di kasus yang sama.

"Ndak siap. Soalnya menghadapi macem-macem itu saya belum pernah," ujarnya saat ditemui di kediamannya di Pagung Kidul, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Rabu (14/5/2025).

Kasmudjo menjelaskan, ia telah berkomunikasi dengan Fakultas Kehutanan UGM mengenai masalah ini. Menurut dia, semua hal terkait perkara ijazah, termasuk gugatan, diserahkan kepada Fakultas Kehutanan untuk memberikan penjelasan.

"Saya sudah kontak sama Dekan Fakultas Kehutanan, Pak Sigit. Segala sesuatunya terkait, apakah itu urusan ijazah, urusan perdata, atau

urusan sebagai wakil untuk memberi penjelasan, semua dari fakultas," tuturnya.

Ia juga menegaskan akan mengikuti arahan dari Fakultas Kehutanan UGM. "Makanya saya juga, walaupun sudah senior, dekannya masih muda, saya harus ikut. Itu yang saya katakan," ungkapnya.

Sebelumnya, Jokowi melakukan kunjungan ke rumah Ir. Kasmudjo di Pagung Kidul, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman. Ir. Kasmudjo, yang kini berusia 78 tahun, adalah dosen pembimbing akademik Joko Widodo saat menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada Selasa (13/5/2025), Ir. Kasmudjo mengungkapkan bahwa ia tidak mengetahui sebelumnya tentang kunjungan Joko Widodo. "Saya lewat Pak Polisi yang ke sini, besok (Joko Widodo) ke sini antara jam 9, jam 10. Saya tidak ada komunikasi langsung bahwa mau ke sana atau ke sini," ujarnya.

Kasmudjo menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Jokowi atas kunjungan tersebut. "Begitu datang, saya terimakasih, maturnuwun saya ditilik i (dijenguk) dulu murid saya. Kalau saya sama orang-orang bilangannya, saya dosennya, saya gurunya," ungkapnya.

Selama pertemuan yang berlangsung sekitar 45 menit, keduanya berbagi kenangan masa-masa kuliah. Kasmudjo mengaku terkejut dan tidak menyangka akan dikunjungi oleh mantan muridnya. "Belum pernah ketemu, baru sekali itu. Di kabari besok Pak Jokowi mau ke sini, menjenguk dosennya. Alhamdulillah, Pak Jokowi menjenguk saya, maturnuwun," tuturnya.

Kasmudjo juga menilai bahwa karakter Joko Widodo tidak banyak berubah sejak masa kuliah. "Kalau saya sejak dulu itu, gayanya Pak Jokowi memang seperti itu. Orang nya kalem, nggak membantah-membantah. Saya itu ngajari jujur, ngajari disiplin, ngajari yang baik-baik," tambahnya. (wid, kum, ist/dya)

Trump Resmi Cabut Sanksi Suriah

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali membuat gebrakan baru, di bawah kepemimpinannya, Washington akan mencabut semua sanksi terhadap Suriah. Diketahui, Suriah telah dicap sebagai negara sponsor terorisme oleh pemerintah AS sejak 1979.

Penetapan tersebut disampaikan Trump dalam pidatonya di Forum Investasi Saudi-AS di Riyadh, Arab Saudi pada Selasa (13/5/2025) waktu setempat, yang termasuk dalam kunjungannya selama empat hari di Timur Tengah.

"Saya akan memerintahkan penghentian sanksi terhadap Suriah untuk memberi mereka kesempatan meraih kejayaan," kata Trump seperti dikutip Rabu (14/5/2025).

Trump menyebut di Suriah, yang telah mengalami begitu banyak kesengsaraan dan kematian, ada pemerintahan baru yang diharapkan akan berhasil menstabilkan negara dan menjaga perdamaian. "Itulah yang ingin kita lihat," imbuhnya.

"Di Suriah, mereka telah mengalami banyak tragedi, perang, pembunuhan selama bertahun-tahun. Itulah sebabnya pemerintahan saya telah mengambil langkah pertama untuk memulihkan hubungan normal antara Amerika Serikat dan Suriah untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade," tambah Trump.

Di sisi lain, Trump menyebut sanksi terhadap Suriah "brutal dan melumpuhkan", di mana ia mengisyaratkan bahwa sanksi tersebut tidak lagi memiliki fungsi penting. "Sekarang, saatnya mereka bersinar," katanya tentang negara tersebut. "Kami akan mencabut semuanya."

"Jadi saya katakan, Semoga beruntung Suriah. Tunjukkan kepada kami sesuatu yang sangat istimewa, seperti yang telah mereka lakukan, terus terang saja, di Arab Saudi," tambah Trump.

Suriah telah ditetapkan sebagai negara sponsor terorisme oleh pemerintah AS sejak 1979. Sanksi AS tambahan dijatuhkan pada negara tersebut pada tahun 2004 dan sekali lagi pada tahun 2011, setelah rezim Presiden Bashar Assad saat itu melancarkan tindakan keras brutal

terhadap pemberontakan anti-pemerintah.

Dalam kurun waktu sekitar 14 tahun sejak itu, negara tersebut telah hancur oleh perang saudara, kekerasan sektarian, dan serangan teroris brutal, termasuk pengambilalihan sebagian wilayah negara oleh ISIS pada tahun 2014, serta kampanye pengeboman yang dipimpin Barat berikutnya untuk membasmi kelompok ekstremis tersebut.

Penggulingan rezim Assad selama serangan mendadak oleh kelompok milisi anti-Assad pada Desember 2024 mengejutkan masyarakat global dan membawa prospek awal baru bagi negara yang hancur tersebut.

Presiden baru Suriah, Ahmed al-Sharaa - mantan anggota al-Qaeda yang menggambarkan dirinya sebagai orang yang telah direformasi - saat ini memimpin pemerintahan transisi negara tersebut.

Presiden Donald Trump juga meminta Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Ini disampaikan Trump dalam pertemuan keduanya di Riyadh, Arab Saudi



Warga Suriah merayakannya pencabutan sanksi AS diumumkan Trump di Lapangan Umayyah, Selasa (13/5/2025). (AP)

setelah ia mengumumkan pencabutan sanksi-sanksi terhadap Suriah.

Trump, dalam kunjungan kenegaraannya ke Riyadh, menjadi presiden AS pertama dalam 25 tahun yang bertemu dengan seorang pemimpin Suriah. Dalam pertemuan pada Rabu (14/5/2025) itu, Trump dan Sharaa berjabat tangan saat bertemu dengan pemimpin de facto Arab Saudi, Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga ikut serta dalam pertemuan itu via tautan video.

Dilansir kantor berita AFP, Rabu (14/5/2025), Gedung Putih mengatakan bahwa Trump meminta pemimpin baru Suriah tersebut untuk

menormalisasi hubungan dengan Israel, bergabung dengan apa yang disebut Perjanjian Abraham, yang telah ditandatangani oleh beberapa negara Teluk Arab.

Trump juga meminta Sharaa untuk mendeportasi para militan Palestina, dan agar otoritas Suriah yang baru mengambil alih kamp-kamp untuk para petempur ISIS yang ditangkap, yang saat ini dikelola oleh para gerilyawan Kurdi yang ditentang oleh Turki, kata Gedung Putih.

Utusan khusus PBB untuk Suriah Geir Pedersen menyambut baik pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump Selasa tentang pencabutan sanksi terhadap Suriah. (wid,afp,rtr,ist/dya)

AS Dapat Hujan Investasi dari Saudi



Tampak Presiden AS Donald Trump bertemu dengan Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa di Riyadh, Arab Saudi, dalam foto yang dirilis Rabu (14/5/2025). (Saudi Press Agency)

PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump membuka perjalanan dinas di Timur Tengah dengan sejumlah kejutan. Dia berhasil mengamankan janji investasi dari Arab Saudi sebesar USD 600 miliar. Ini seiring pengumuman berakhirnya sanksi AS terhadap Suriah.

Donald Trump mengaku bertindak mencabut sanksi atas permintaan penguasa de facto Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman. "Aduh, segala yang aku lakukan demi putra mahkota," tukasnya yang disambut derai tawa audiens. "Saya sungguh

percaya bahwa kami menyukai satu sama lain."

Termasuk ke dalam paket investasi senilai USD600 miliar milik Saudi adalah belanja militer senilai hampir USD142 miliar, menurut Gedung Putih yang menyebutnya sebagai "kesepakatan kerja sama pertahanan terbesar" yang pernah dibuat AS.

Menurut lembar fakta dari Gedung Putih, kesepakatan ini mencakup kerja sama dengan lebih dari selusin perusahaan pertahanan AS, meliputi pertahanan udara dan rudal, angkatan udara dan luar angkasa, keamanan maritim, serta komunikasi.

Belum jelas apakah kesepakatan tersebut mencakup jet tempur Lockheed F-35, yang menurut sejumlah sumber ikut menjadi bahan pembahasan. Putra Mahkota Saudi mengatakan bahwa nilai keseluruhan paket bisa mencapai USD1 triliun seiring tercapainya per-

janjian tambahan dalam beberapa bulan ke depan.

Arab Saudi merupakan salah satu pembeli terbesar senjata buatan AS, dan kedua negara telah menjadi sekutu dekat selama beberapa dekade. Berdasarkan kesepakatan tidak tertulis, demikian menurut lingkaran diplomat, kerajaan menyediakan minyak, sementara AS menjamin keamanan dan kelangsungan dinasti al-Saud.

Trump dan bin Salman juga menandatangani kesepakatan di sektor energi, pertambangan, dan bidang lain. Trump berupaya memperkuat hubungan dengan Arab Saudi guna meningkatkan kerja sama regional dengan Israel dan menjadi penyeimbang terhadap pengaruh Iran.

Beberapa tokoh bisnis ternama dari Amerika Serikat turut menghadiri acara tersebut, termasuk Elon Musk, CEO Tesla dan pionir industri kecerdasan buatan Sam Altman, serta dua raksasa investasi AS: CEO BlackRock Larry Fink dan CEO Blackstone Stephen Schwarzman. (wid,rtr,ist/dya)